

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi ekonomi lokal dipandang sebagai solusi yang tepat guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disebut Provinsi Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat, perlu didorong agar dapat berfungsi sebagai lokomotif ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Koperasi sebagai lembaga ekonomi masih memiliki keterbatasan dalam mengakses modal. Koperasi perlu diberdayakan melalui perkuatan modal usaha, agar dapat mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki, dalam rangka pembukaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan

pendapatan bagi koperasi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah menyediakan dana untuk pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT. Dana ini dipinjamkan kepada koperasi dan UMKM dengan tingkat bunga rendah dibandingkan dengan tingkat bunga bank, maka diharapkan para pemilik koperasi dan UMKM penerima pinjaman, dapat mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dalam persaingan pasar. Pemberian pinjaman modal dengan sistem bergulir ini dimaksudkan agar penerima angsuran pinjaman, nantinya dapat digulirkan atau dipinjamkan kembali baik kepada penerima pinjaman yang sudah lunas maupun kepada KUMKM lainnya. Agar dana pinjaman yang disalurkan tepat sasaran, maka sebelum menentukan penerima pinjaman, dilakukan survei kelayakan terhadap calon peminjam yang dilakukan oleh tim survei. Survei ini dilakukan untuk mengetahui kondisi koperasi secara langsung. Hasil tersebut dijadikan analisa untuk mengetahui kelayakan dari koperasi. Data yang digunakan dijadikan dasar dalam menentukan koperasi penerima pinjaman dana bergulir selain syarat-syarat administrasi lainnya.

Hasil wawancara bersama Bapak Ramly Umar Mahing, SE selaku Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT tanggal 27 April 2018, mengatakan bahwa salah satu data yang diminta dalam survei adalah data keuangan koperasi dan jumlah

anggota aktif, karena sebagian koperasi masih ada yang menggunakan catatan keuangan sederhana bahkan ada yang tidak memiliki catatan keuangan. Hal ini dikarenakan dalam mengelola koperasi belum menggunakan manajemen yang baik dan belum didukung sumber daya manusia yang memadai sehingga penyaluran kredit kepada KUMKM ini tidak berjalan secara maksimal, dan mengakibatkan terjadinya kredit macet atau tunggakan.

Tabel 1.1 Data Perkembangan Dana Bergulir APBD 1 Provinsi NTT

No	Tahun Kucuran	Koperasi/ Kelompok	Alokasi Dana (Rp)	Pengembalian s.d 2017 (Rp)	Tunggakan (Rp)
1	2007	KJUB Nusa Sehat	1.00.000.000	528.000.000	472.000.000
		PUSKUD NTT	300.000.000	300.000.000	-
		PUSKUD NTT	300.000.000	300.000.000	-
2	2008	Beni Subagiyo, SE/PUSKUD NTT	1.300.000.000	1.300.000.000	-
3	2009	Kop Perempuan Cinta Kasih	100.000.000	32.555.600	67.444.400
		PUSKUD	5.500.000.000	4.850.000.000	700.000.000
		KPN Bangun Jaya	200.000.000	116.667.600	83.332.400
		KSU Nekak Buak	100.000.000	5.500.000	94.500.000
		KUB Amfini	100.000.000	-	100.000.000
		Prospek Mandiri	35.000.000	5.685.000	29.315.000
		KSU Gracia Plena	100.000.000	2.777.800	97.222.200
		KUN Citra Nusa	50.000.000	1.390.000	48.610.000
		Kopdit Familia	200.000.000	200.000.000	-
		Kopdit Benza	150.000.000	150.000.000	-
		Kopdit Swasti Sari	1.400.000.000	1.400.000.000	-
		KSU Sama Fonga	50.000.000	50.000.000	-
		KUB Ute	35.000.000	35.000.000	-
		KSP Ranaka	350.000.000	350.000.000	-

		KPN Marieta	500.000.000	500.000.000	-
		Kopdit Serviam	1.000.000.000	1.000.000.000	-
4	2010	KSU Kiblat	50.000.000	22.400.000	27.600.000
		KSU Wanita Cendana (Coopmart)	100.000.000	16.680.000	83.320.000
		KPRI Gelekat Nara (Coopmart)	180.000.000	20.000.000	160.000.000
		KSU Cahaya Ilahi (Coopmart)	150.000.000	1.500.000	148.500.000
		KSP Pintu Sejahtera	50.000.000	33.350.000	16.650.000
		KSU Tani dan Tenun Ikat Kasih NTT	50.000.000	2.777.800	47.222.200
		KSU Sinar Kane	50.000.000	9.723.000	40.277.000
		KSU Ritona	50.000.000	50.000.000	-
		KUBSP Biji Sesawi	100.000.000	100.000.000	-
		Koperasi Kredit Timau	100.000.000	100.000.000	-
		KSP Samamora	150.000.000	150.000.000	-
		Koperasi PRI Samapta Bhakti	150.000.000	150.000.000	-
		KUBSP St. Fransiskus Xaverius	50.000.000	50.000.000	-
Total			14.000.000.000	11.834.006.800	2.165.993.200

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT Tahun 2017

Dilihat dari tabel 1.1 data perkembangan dana bergulir APBD 1 Povinsi NTT menunjukkan bahwa dana bergulir disalurkan pada 33 (tiga puluh tiga) koperasi di tingkat Provinsi, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp14.000.000.000. Selanjutnya, Provinsi NTT dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 adalah periode menerima pengembalian dana bergulir. Selama periode ini, terdapat 16 (enam belas) koperasi ditahun 2007, 2009, dan 2010 yang mengalami penunggakan dan tidak ada peningkatan

dalam pengembalian dana, hal ini disebabkan karena Koperasi atau UMKM/Kelompok Masyarakat tidak menyetor kembali dana yang telah diberikan, omset penjualan kurang dari modal awal, dan adanya bencana yang terjadi seperti kebakaran atau meninggal.

Berdasarkan data terakhir di tahun 2017, untuk Koperasi dan UMKM Provinsi yang belum mengembalikan dana bergulir tersebut sebesar Rp2.165.993.200. Berdasarkan kasus diatas, maka penulis memfokuskan pembahasan mengenai bantuan dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT dengan mengangkat judul **“Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi NTT Tahun Anggaran 2007-2010”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan dana bergulir dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi NTT kepada Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana bergulir?
2. Bagaimana penanganan tunggakan pada koperasi dan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitiann

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Dana Bergulir dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT kepada Koperasi dan UMKM penerima bantuan dana bergulir.
2. Untuk mengetahui penanganan tunggakan pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan penentu kebijakan dalam pengelolaan dan penetapan persyaratan untuk memperoleh dana bergulir
2. Sebagai informasi awal untuk penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan dana bergulir dan pengolalaanya pada koperasi dan UMKM yang ada di Provinsi.